

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade terakhir, dinamika politik dan ekonomi global telah mengalami pergeseran besar yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh negara-negara non-barat dalam hubungan internasional. Salah satu aktor yang menonjol dalam perubahan ini adalah Tiongkok yang sejak awal abad ke-21 memainkan peran sentral dalam sistem internasional melalui kebijakan luar negeri yang ekspansif dan inovatif. Salah satu strategi utama yang digunakan Tiongkok untuk memperluas pengaruh globalnya adalah *Belt and Road Initiative* (BRI) yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan jaringan konektivitas ekonomi, infrastruktur dan kerja sama pembangunan yang menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa melalui jalur darat dan laut (Hillman, 2020).

BRI merupakan proyek pembangunan global yang tidak hanya mencakup investasi fisik berupa infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan dan jalur kereta api, tetapi juga mencakup aspek kerja sama keuangan, teknologi dan kebudayaan. Melalui inisiatif ini, Tiongkok berupaya memperluas jaringan pengaruh ekonomi dan politiknya sekaligus menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara mitra termasuk di kawasan Afrika (Rolland, 2017). Afrika merupakan kawasan yang sangat strategis dalam skema BRI karena posisinya yang penting dalam jalur maritim serta kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini menjadikan negara-negara Afrika sebagai mitra potensial bagi kebijakan luar negeri Tiongkok. Menurut David Dollar (2015), kawasan Afrika memainkan peran penting dalam strategi eksternal Tiongkok karena menyediakan akses terhadap sumber daya energi dan mineral yang dibutuhkan untuk mendukung industrialisasi domestik Tiongkok. Selain itu,

laporan McKinsey & Company (2017) mencatat bahwa keterlibatan Tiongkok di Afrika tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga membentuk hubungan jangka panjang melalui pembangunan institusi dan pengaruh diplomatik, yang semuanya diperkuat oleh kehadiran proyek-proyek BRI di hampir seluruh benua tersebut (Dollar, 2016; Sun et al., 2017).

Menurut Corkin (2016), Angola menjadi salah satu negara Afrika yang paling menonjol dalam konteks kerja sama dengan Tiongkok. Dalam bukunya Corkin yang berjudul *"Uncovering African Agency: Angola's Management of Tiongkok's Credit Lines"* tertulis bahwa Angola merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar kedua di Sub-Sahara Afrika, Angola menarik minat investasi asing terutama dari Tiongkok. Sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 2002, Angola mengalami masa rekonstruksi nasional yang membutuhkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dalam kondisi ini, Tiongkok hadir sebagai mitra pembangunan yang menawarkan paket kerja sama ekonomi, teknologi dan pembiayaan yang menggiurkan terutama melalui skema pinjaman berbasis sumber daya alam (Corkin, 2016). Hubungan bilateral antara Angola dan Tiongkok telah berkembang pesat, terutama selama masa pemerintahan Presiden José Eduardo dos Santos. Tiongkok menjadi kreditur terbesar Angola dan mendanai berbagai proyek infrastruktur utama termasuk pembangunan jalan raya, jalur kereta api, rumah sakit dan perumahan rakyat (Alves, 2013). Selain itu, Tiongkok juga menyediakan bantuan teknis dan investasi dalam sektor energi serta pertambangan. Kerja sama ini tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan tetapi juga mengindikasikan kepercayaan politik yang tinggi antara kedua negara.

Namun, keberhasilan yang telah dicapai melalui kerja sama Angola-Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari peran sentral yang dimainkan oleh pemimpin nasional Angola. Sistem politik Angola yang cenderung sentralistik menjadikan figur presiden sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri. José Eduardo dos Santos yang memimpin Angola selama hampir empat dekade dikenal memiliki

hubungan erat dengan Beijing dan memanfaatkan kerja sama dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan pasca-konflik (DE OLIVEIRA, 2015). Kebijakan luar negeri Angola pada masa tersebut cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi pada pembangunan domestik.

Setelah transisi kekuasaan kepada Presiden João Lourenço pada tahun 2017, banyak pengamat memperkirakan adanya perubahan dalam orientasi kebijakan luar negeri Angola, terutama dalam hal diversifikasi mitra internasional dan peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya alam negara. Namun, kenyataannya kerja sama dengan Tiongkok tetap berlanjut dan bahkan mengalami perluasan dalam beberapa sektor strategis. Secara resmi, Angola bergabung dalam kerangka Belt and Road Initiative pada September 2018 melalui penandatanganan nota kesepahaman di ajang Forum on China–Africa Cooperation (FOCAC) di Beijing. Kesepakatan tersebut mencakup proyek strategis seperti rehabilitasi Jalur Kereta Api Benguela, modernisasi Pelabuhan Lobito dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Soyo yang dikategorikan sebagai proyek perdana BRI di Angola (Affairs and China, n.d.). Fenomena kesinambungan ini menarik untuk dikaji pada level individu, mengingat sistem politik Angola yang sangat terpusat menempatkan presiden sebagai aktor utama dalam penentuan arah kebijakan luar negeri. Lourenço, dengan gaya kepemimpinan dan preferensi politiknya, tidak hanya mempertahankan kerja sama strategis dengan Tiongkok, tetapi juga mengarahkan penyesuaian kebijakan yang mencerminkan karakteristik personalnya. Hal tersebut menjadikannya figur yang relevan untuk dianalisis melalui pendekatan idiosinkratik, guna memahami keterkaitan antara faktor kepribadian pemimpin dengan orientasi kebijakan luar negeri Angola dalam pendekatan kebijakan luar negeri Angola terhadap Tiongkok, terlepas dari perubahan kepemimpinan politik domestik (Morlin Yron, S. & Smith, 2017). Penting untuk dicermati bahwa proyek BRI yang ditawarkan Tiongkok bukanlah tanpa kontroversi. Beberapa negara mitra BRI di Afrika dan Asia mengalami peningkatan hutang luar negeri yang signifikan akibat skema pinjaman besar-besaran dari Tiongkok. Hal ini menimbulkan kekhawatiran

mengenai potensi jebakan hutang (*debt trap diplomacy*) yang dapat melemahkan kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang (Hurley, Morris, and Portelance, 2019). Dalam konteks Angola, meskipun kerja sama dengan Tiongkok telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, namun beban hutang eksternal negara ini juga meningkat secara signifikan yang menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan jangka panjang kerja sama tersebut.

Setelah Angola menerima kerja sama melalui BRI di bawah kepemimpinan João Manuel Gonçalves Lourenço, perubahan besar terlihat terutama pada upaya diversifikasi ekonomi dan pembenahan tata kelola publik. Lourenço, yang berkuasa sejak 2017 berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak bumi dengan mendorong investasi ke sektor infrastruktur, pertanian, logistik dan energi terbarukan di mana proyek-proyek BRI memainkan peran penting dalam percepatan pembangunan fisik seperti jalur kereta api, pelabuhan dan pembangkit listrik. Selain itu, pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman dan investasi asing termasuk dari Tiongkok untuk mencegah korupsi dan memastikan manfaat ekonomi lebih merata bagi masyarakat lokal. Namun, tantangan tetap ada, seperti risiko ketergantungan pada pinjaman Tiongkok yang mencapai puluhan miliar dolar serta dominasi perusahaan Tiongkok yang kadang membatasi partisipasi dan keuntungan masyarakat Angola sendiri. Secara keseluruhan, Lourenço berupaya menyeimbangkan kerja sama dengan Tiongkok melalui BRI dengan memperluas mitra luar negeri, meningkatkan keterlibatan sektor swasta nasional dan menjaga kedaulatan ekonomi negara (Nauvally, 2025).

Di sisi lain, Tiongkok secara konsisten menolak tuduhan bahwa BRI merupakan bentuk kolonialisme baru. Menurut Beijing, BRI adalah bentuk kerja sama pembangunan yang bersifat saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara mitra. Tiongkok juga menekankan bahwa pendekatannya berbeda dari negara-negara barat yang seringkali mensyaratkan reformasi politik atau liberalisasi pasar sebagai prasyarat bantuan

pembangunan (Copper, 2016). Pendekatan ini tampaknya sesuai dengan kebutuhan Angola yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur tanpa campur tangan dalam urusan politik domestik. Selain faktor ekonomi dan politik luar negeri, keberhasilan kerja sama Angola-Tiongkok juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya. Tiongkok telah mengembangkan berbagai bentuk diplomasi menggunakan *soft power* di Angola, seperti pemberian beasiswa pendidikan, pertukaran budaya dan pelatihan teknis. Langkah-langkah ini membantu memperkuat hubungan bilateral dan menciptakan citra positif Tiongkok di mata publik Angola. Namun, terdapat pula tantangan dalam hal integrasi sosial dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan, termasuk isu kualitas pekerjaan, ketergantungan pada tenaga kerja asing dan kurangnya transfer teknologi (Lee, 2009).

Dalam konteks global, respons negara-negara terhadap BRI sangat bervariasi. Beberapa negara di Asia dan Eropa, seperti Pakistan dan Italia menyambut BRI sebagai peluang untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan. Sementara itu, negara-negara lain seperti India dan Amerika Serikat menolak atau skeptis terhadap inisiatif ini karena dianggap memiliki implikasi geopolitik yang merugikan keseimbangan kekuasaan regional (Balding, 2018). Di Afrika, pendekatan terhadap BRI sangat tergantung pada dinamika politik domestik, struktur ekonomi nasional dan persepsi publik terhadap Tiongkok sebagai mitra strategis.

Angola sebagai studi kasus menawarkan perspektif menarik mengenai bagaimana negara berkembang merespons tawaran kerja sama luar negeri dalam kerangka geopolitik yang kompleks. Meskipun memiliki sejarah kolonial yang traumatis dan menghadapi tantangan besar dalam pembangunan pasca-konflik, Angola mampu memanfaatkan kerja sama dengan Tiongkok untuk mempercepat proses rekonstruksi. Namun, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran kepemimpinan yang kuat dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika internasional sehingga penting untuk memahami konteks domestik dan peran aktor individual dalam menentukan arah kebijakan luar negeri sebuah negara. Dalam kasus Angola, pemimpin nasional memainkan peran sentral

dalam merespons skema dari BRI dan menjalin kerja sama strategis dengan Tiongkok. Pendekatan ini mencerminkan dinamika internal yang kompleks dan menunjukkan bahwa keputusan dalam hubungan internasional bukan hanya didasarkan pada kalkulasi rasional institusional, namun juga dipengaruhi oleh preferensi personal, gaya kepemimpinan dan persepsi terhadap mitra internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan dari dinamika hubungan bilateral antara Angola dan Tiongkok dalam kerangka BRI yang menunjukkan keberlanjutan dan intensifikasi kerja sama, terlepas dari adanya pergantian kepemimpinan politik di Angola. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan riset: "Bagaimana faktor idiosinkratik João Manuel Gonçalves Lourenço memengaruhi keputusan untuk menerima kerja sama dengan Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative (BRI)*?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pribadi atau idiosinkratik dari João Lourenço dapat memengaruhi keputusan politik luar negeri Angola dalam menjalin dan mempertahankan kerja sama dengan Tiongkok dalam kerangka BRI. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengeksplorasi keunikan personalitas João Lourenço dapat memengaruhi keberlanjutan hubungan bilateral Angola-Tiongkok. Landasan tujuan penelitian ini merujuk pada pendekatan idiosinkratik yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann (1980) yang menegaskan bahwa faktor-faktor pribadi pemimpin seperti kebutuhan terhadap kekuasaan, kompleksitas konseptual, nasionalisme, keyakinan terhadap kemampuan mengontrol peristiwa, serta tingkat kecurigaan terhadap aktor luar negeri dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap orientasi dan keputusan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini menjadi kerangka penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik idiosinkratik yang dimiliki

pemimpin Angola saat ini yang relevan terhadap keputusan pemerintah dalam melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok. Penelitian ini juga berupaya mengkaji hubungan antara karakteristik idiosinkratik tersebut dengan arah kebijakan luar negeri Angola dan menilai sejauh mana pergantian kepemimpinan dapat memengaruhi perubahan dalam hubungan bilateral antara Angola dan Tiongkok. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika internal yang membentuk respons Angola terhadap kerja sama luar negeri, khususnya di bawah kepemimpinan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional yang berfokus pada peran aktor individu, khususnya dalam konteks *South to South Cooperation* dan diplomasi pembangunan yang dipromosikan oleh Tiongkok melalui kerangka BRI (Hermann, 1980).

1.3.1 Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi mengenai pengembangan kajian hubungan internasional pada level analisis individu, khususnya melalui pendekatan idiosinkratik Margaret G. Hermann.
- b) Memperkuat pemahaman mengenai personalitas dan gaya kepemimpinan pemimpin nasional dapat memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri terutama di negara-negara dengan sistem politik yang terpusat.
- c) Menambahkan kajian akademik mengenai keterlibatan negara-negara Afrika dalam proyek BRI dengan pendekatan yang menekankan agensi negara mitra, bukan hanya dominasi Tiongkok.
- d) Menawarkan kerangka konseptual alternatif bagi studi hubungan bilateral dalam konteks *South to South Cooperation* dan diplomasi pembangunan.

1.3.2 Manfaat Praksis

- a) Menjadi acuan bagi pembuat kebijakan di negara berkembang dalam merumuskan strategi kerja sama luar negeri yang mempertimbangkan karakteristik kepemimpinan nasional.
- b) Memberikan panduan bagi diplomat dan perancang kebijakan luar negeri dalam memahami dan menyesuaikan pendekatan terhadap pemimpin mitra negara lain.
- c) Membantu organisasi pembangunan internasional untuk memahami faktor internal dalam negara mitra yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek kerja sama seperti pada BRI.
- d) Menjadi sumber referensi akademik bagi peneliti dan mahasiswa yang mengkaji hubungan internasional Afrika, kepemimpinan politik serta diplomasi Tiongkok di negara-negara berkembang.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi '*Faktor Idiosinkratik João Manuel Gonçalves Lourenço Menerima Kerjasama Tiongkok Dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI)*' akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang akan menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan diberikan melalui penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka yang akan menyajikan dan memaparkan tentang penggunaan teori idiosinkratik sebagai acuan yang akan digunakan dalam penelitian, memaparkan penelitian terdahulu sebagai aspek pertimbangan arah penelitian serta alur kerangka pemikiran dari peneliti.

BAB III Metodologi penelitian yang akan menyajikan penguraian bagaimana metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan riset dari rumusan masalah dalam penelitian lengkap dengan penggunaan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan akan memaparkan pembahasan yang menjadi inti dari penelitian lengkap dengan penyajian data dan argumentasi serta jawaban dari pertanyaan riset yang telah dikaji berdasarkan teori idiosinkratik. Pada bab ini

akan terdiri dari pembahasan berdasarkan tujuh parameter yang akan menjelaskan bagaimana faktor idiosinkratik João Manuel Gonçalves Lourenço memengaruhi keputusan Angola dalam menerima kerja sama Tiongkok melalui skema kerja sama BRI.

BAB V Penutup akan memaparkan kesimpulan dan saran pada bagian akhir dari penelitian yang relevan dengan penelitian ini

